

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Pengertian Wawasan kebangsaan

Menurut Prof. Muladi, Mantan Gubernur Lemhannas RI, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang menempatkan kesatuan dan persatuan wilayah sebagai prioritas dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Integrasi nasional ini tidak hanya berfokus pada aspek struktural, tapi juga mencakup kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan.(Soeprijanto, 2021)

Menurut (Wiratmaja et al., 2021)menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan bagi Indonesia memiliki beberapa makna, diantaranya: Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; Wawasan kebangsaan tidak memberikan tempat kepada patriotisme yang licik; Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan bangsa Indonesia sedemikian rupa sehingga asas semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat dipertahankan Dengan wawasan kebangsaan yang berlandas pada pandangan pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan untuk menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan mandiri serta sejahtera maupun lahir batin, dan akan sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

Wawasan kebangsaan merupakan perspektif diri sebagai bangsa terhadap ciri khas karakter sebagai bangsa itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa wawasan kebangsaan berarti sebagai cara kita memandang diri kita sendiri sebagai seorang bangsa yang wajib dapat memperlihatkan kobaran rasa semangat kebangsaan dan juga karakteristik

kebangsaan Indonesia serta dapat mempertahankan jati dirinya sebagai seorang bangsa dari negaranya (Dewi, 2021)

Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu Negara dan sejarah yang dialaminya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, social-budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna dan hakekat serta pengejawantahan wawasan kebangsaan tersebut penting dipahami oleh setiap warga Negara Indonesia.

Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan yang menemukan titik tolaknya dalam kemanusiaan. Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat di UUD 1945, Dalam zaman kebangkitan nasional 1908 terjadi proses bhineka tunggal ika. Berdirinya Budi Utomo telah mendorong terjadinya gerakangerakan atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik dipandang dari tujuan maupun dasarnya. Ada yang berdiri atas kesukuan, golongan, maupun campuran. Ada gerakan kedaerahan, kepemudaan, kewanitaan, maupun serikat sekerja. Ada pula organisasi yang bergerak di lapangan pendidikan, kebudayaan, keagamaan, perekonomian dan politik.

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Secara etimologi istilah wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Dalam kamus tersebut diberikan contoh “Wawasan Nusantara” yaitu wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai Tujuan Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan

pertahanan keamanan. Lebih lanjut diberikan pula contoh dalam pengertian lain seperti “Wawasan Sosial”, sebagai “kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau penempatan diri di lingkungan sosial. Walaupun dalam rumusan yang berbeda, karena dikaitkan dengan dua subyek yang berbeda yaitu antara wawasan “nusantara” dan wawasan “social” sebagaimana diutaran diatas, namun dapat diambil intisarinnya bahwa wawasan pada pokoknya mengandung pengertian kemampuan untuk memahami cara memandang sesuatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya.

Penguatan wawasan kebangsaan merupakan suatu hal harus dilakukan secara terus menerus sejalan dengan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi kalangan siawa (generasi muda) akan berimplikasi terhadap eksistensi negara pada masa yang akan datang, maju mundurnya suatu negara, dan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, pada dasarnya jika terjadi degradasi semangat persatuan dan kesatuan, yang tertinggal hanyalah kelompok-kelompok kecil yang berdasarkan suku, agama, dan kedaerahan, kurang memiliki pemahaman kebangsaan. Maka tepat kalau primordialisme, eksklusif pada suku, etnik, daerah, agama yang tidak lagi merasakan kebangsaan dan kegembiraan dalam kebersamaan nasional. Berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan, penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda saat ini masih terpusat di pendidikan formal melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Hal tersebut dikarenakan mata pelajaran PPKn memiliki peran strategis dalam memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat (1) bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Pada intinya salah satu tujuan dari mata pelajaran PPKn adalah membentuk generasi muda untuk memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Setiawan Hasibuan et al., n.d.)

Penguatan wawasan kebangsaan merupakan suatu hal harus dilakukan secara terus menerus sejalan dengan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi kalangan generasi muda akan berimplikasi terhadap eksistensi negara pada masa yang akan datang, maju mundurnya suatu negara, dan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, pada dasarnya jika terjadi degradasi semangat persatuan dan kesatuan, yang tertinggal hanyalah kelompok-kelompok kecil yang berdasarkan suku, agama, kedaerahan, homogeni ke dalam, eksklusif keluar, baginya kebangsaan kata yang kosong. Maka tepat kalau primordialisme, eksklusif pada suku, etnik, daerah, agama yang tidak lagi merasakan kebangsaan dan kegembiraan dalam kebersamaan nasional. Berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan, penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda saat ini masih terpusat di pendidikan formal melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Masyarakat intelektual, termasuk pakar, lebih tertarik dan mementingkan nilai-nilai universal ketimbang nilai-nilai nasional. Akibatnya, rumusan pengertian wawasan kebangsaan sangat beragam dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Sejatinya wawasan kebangsaan perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Dengan demikian wawasan kebangsaan akan punya makna dan menyentuh langsung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua itu, perlu semangat kebangsaan atau nasionalisme, yang merupakan perpaduan atau sinergi rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Kondisi semangat kebangsaan atau nasionalisme bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. (Setiawan Hasibuan et al., n.d.-b)

Nilai kebangsaan yang secara umum terdapat pula dalam nilai-nilai budaya masyarakat suku bangsa yang terdapat di Indonesia tersebut, dijadikan tali pengikat yang menjalin persatuan berbagai suku bangsa tersebut menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip Pancasila, yang juga merupakan vision of state untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. (Wiratmaja et al., 2021)

Pemahaman generasi muda tentang Wawasan Kebangsaan masih rendah. Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2018 menunjukkan, hanya sekitar 6,2% siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar tentang materi wawasan kebangsaan. Sementara itu, hasil survey Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia (PSKI) 2022, diketahui 28,6% siswa memahami Pancasila di ruang kelas, sementara 21,7% siswa memahaminya dari media sosial. Hal yang memperhatikan, jika dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya penanganan yang serius ini akan menjadi masalah besar.

2.1.2. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPkn)

Bentuk pentingnya pendidikan kewarganegaraan tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, tertera pada poin (b). setelah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan wajib yang harus diajarkan kepada peserta didik, dengan harapan pengetahuan Kewarganegaraan ini untuk menjadikan peserta didik menjadi cinta tanah air dan memiliki rasa kebangsaan. Peraturan pemerintah menyatakan mengenai standar nasional Pendidikan wawasan kebangsaan agar ditujukan peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam lingkup nilai serta moral bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan (PPKn) pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang memiliki pembahasan tentang kebangsaan, masalah kewarganegaraan yang berkaitan dengan negara, demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat sipil, serta menerapkan prinsip demokrasi dan pendidikan humanistik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran penting dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Mata pelajaran ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada peserta didik. Wawasan kebangsaan sendiri didefinisikan sebagai pemahaman, kesadaran, dan keyakinan terhadap bangsa dan negara Indonesia yang disertai dengan semangat untuk membela dan membangunnya.

Pandangan lain mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengingatkan warga negara akan pentingnya nilai, hak dan kewajiban, agar

segala sesuatu yang dilakukan sejalan dengan tujuan dan cita-cita negara serta tidak menyimpang dari harapan.(R. R. Dewi, 2021) Pandangan lain mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengingatkan warga negara akan pentingnya nilai, hak dan kewajiban, agar segala sesuatu yang dilakukan sejalan dengan tujuan dan cita-cita negara serta tidak menyimpang dari harapan.

Esensi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan dalam suatu negara agar warga negara memiliki pengetahuan (*knowledge*), nilai (*values*), dan keterampilan (*skills*) yang nantinya dapat menciptakan warga negara yang kompeten. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ras, suku, agama, yang tentunya memiliki budaya yang amat sangat beragam, pendidikan kewarganegaraan tentunya diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang memiliki jiwa toleransi dan rasa patriotisme yang saling menghargai perbedaan, dan bangga akan kekayaan di negeri ini.

Ada empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, keempat pilar tersebut yakni: Pancasila, UUD Negara RI 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Saat ini pola kehidupan remaja atau generasi muda kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam ideologi Negara, sikap toleransi dan tanggung jawab menjadi bagian dalam kehidupan berkebangsaan.(Siregar, 2022)

Menurut Anis Fauzi (2018) dalam bukunya tentang wawasan kebangsaan untuk siswa SMP sederajat, wawasan kebangsaan mempunyai makna yang mengamanatkan pada seluruh bangsa untuk menempatkan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan asas bhineka tunggal ika yang juga mengembangkan sebuah persatuan dan kesatuan dalam NKRI, serta menyimpulkan bahwa asas dari wawasan kebangsaan tidak memberi ruang pada patriotisme yang licik.(Al Farisi et al, 2023)

Suwarma dan Iswandi (2018, hlm. 492) menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi pengaruh negatif globalisasi”. Maka salah satu upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dapat dilakukan

melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang materi-materi pembelajarannya memuat tentang pemahaman wawasan kebangsaan.

“Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

Pendapat Djahiri di atas menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan warga negara yang bertanggung jawab serta meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh

tanggung jawab, yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila ialah seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sifat intelektual tersebut tercermin pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari aspek iptek, etika, ataupun kepatutan agama serta budaya.

Pendidikan Pancasila bertujuan menghasilkan peserta didik yang beriman dan

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku:

- memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya,
- memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya,
- mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta
- memiliki kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia, Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu

memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Selain diorientasikan untuk menanamkan identitas bangsa, Pendidikan Pancasila dan *civic education* juga harus mampu menginternalisasikan Pancasila sebagai filsafat bangsa. Prof. Dr. Daoed Yoesoef pernah melontarkan kritik atas pemahaman minor masyarakat kita terhadap Pancasila. Menurutnya, Pancasila hingga kini masih dipahami sebagai kumpulan unsur atau bagian yang belum menjadi sebuah sistem yang saling terkait. Pancasila belum dipahami sebagai lima unsur atau lima sila yang dijadikan satu, namun lebih dimaknai sebagai bagian-bagian yang terpisah. (Kunawi Basyir.dkk, n.d.)

Padahal jika Pancasila dipahami sebagai falsafah bangsa, maka semestinya keterkaitan antar-lima sila yang ada harus dikedepankan, bukan dipisahkan. Ketuhanan yang Maha Esa misalnya, dipahami terpisah dengan sila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa, yang bersifat hakikat diubah menjadi bersifat instrumental. Tuhan direduksi menjadi ritual yang instrumen. Masih banyak keinginan untuk mengubah sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Dalam proses perjalanan bangsa menuju masyarakat madani (*civil society*), Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah di perguruan tinggi perlu menyesuaikan diri sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang berubah. Proses pembangunan karakter bangsa (*nation character building*) yang sejak proklamasi kemerdekaan RI telah mendapat prioritas, perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi Negara RI.

Pada hakikatnya, proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Dalam proses itulah, pembangunan karakter bangsa kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak dan tentunya memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru.

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma barunya yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok, yakni

mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic knowledge*), membina keterampilan warga negara (*civic skill*) dan membentuk watak warga negara (*civic disposition*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional, melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial sehingga paradigma baru PPKn bercirikan multidimensional.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga mempunyai karakteristik berbeda dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran ini merupakan multidisiplin ilmu karena didalamnya mencakup beberapa materi seperti hukum, politik, pemerintahan, sosial dan budaya. Pendidikan Pancasila juga bisa diasumsikan sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan pendidikan nilai moral. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran atau mata kuliah yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara agar mampu berpartisipasi. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang konten materinya mayoritas hafalan membawa kecenderungan para guru untuk terjebak pada metode belajar ceramah karena guru tidak mau mencoba menggunakan beragam model pembelajaran yang menarik (Nurgiansah et al., 2021)

membangun anak-anak bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa diperlukan satu usaha, salah satunya yaitu melalui pendidikan secara nasional. Tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan secara nasional antara lain bahwa pendidikan nasional harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air dengan kemajemukan dan keberagaman yang ada di Indonesia, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan juga diharapkan dapat menjadi wahana untuk melakukan pembentukan wawasan dan karakter bangsa, dan memperkuat komitmen kebangsaan menuju kehidupan berkualitas dan bermartabat. (Nur Cahyaning Asih & Zuriah, 2018)

Pelajaran PPKn ini merupakan salah satu pelajaran penting yang harus dimasukkan kedalam pembelajaran setiap kelas di berbagai jenjang pendidikan, baik Siswa dari sekolah dasar (SD), (SMP), (SMA) maupun perguruan tinggi.

2.1.3. Wawasan kebangsaan

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Secara etimologi, istilah wawasan berarti hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Dalam kamus tersebut diberikan contoh “Wawasan Nusantara” yaitu wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai Tujuan Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Lebih lanjut diberikan pula contoh dalam penegertian lain seperti “Wawasan Sosial”, sebagai “kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau penempatan diri di lingkungan sosial. Walaupun dalam rumusan yang berbeda, karena dikaitkan dengan dua subyek yang berbeda yaitu antara wawasan “nusantara” dan wawasan “social” sebagaimana diutaran diatas, namun dapat diambil intisarinnya bahwa wawasan pada pokoknya mengandung pengertian kemampuan untuk memahami cara memandang sesuatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya.

Wawasan kebangsaan adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 yang merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan melemahnya tingkat wawasan kebangsaan pada generasi muda, juga akan mengurangi kesadaran akan pentingnya melakukan kewajiban masyarakat sebagai subjek bela negara demi menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.

Pemahaman tentang wawasan kebangsaan merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan dalam membentuk generasi bangsa yang memiliki rasa dan sikap nasionalisme. Menurut Sofyan dan Sundawa, pada hakikatnya wawasan kebangsaan mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dalam persiapan dunia yang globalistik tanpa harus kehilangan akar budaya dan nilai-nilai dasar Pancasila. (Hanipah, 2022)

Wawasan kebangsaan menurut L.B. Moerdani dalam buku “menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa” memiliki tiga dimensi yang harus dihayati dan diwujudkan secara keseluruhan, agar tumbuh kesadaran berbangsa yang kokoh dan bulat. Ketiga dimensi itu adalah rasa kebangsaan, faham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

tujuan pendidikan ini akan berdampak jangka panjang, karena menanamkan nilai nilai kebangsaan pada generasi muda akan menciptakan pemimpin pemimpin yang memiliki rasa cinta air yang tinggi, karena generasi muda inilah yang akan memimpin negeri ini suatu saat nanti.

Namun Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu: satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan ini tentunya tidak memandang ras, suka, dan agama, dengan kata lain wawasan ini menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan bangsa atau yang dapat disebut sebagai wawasan kebangsaan Indonesia.

Dalam hubungan ini Bintoro (2016) mengemukakan bahwa: *Reason d'etre* negara Indonesia bukan berdasar sosioantropologis (etnik), tetapi karena pengalaman sejarah ditindas kolonialisme dan mengaspirasikan kehidupan kebangsaan yang bebas.(Negara, n.d.)

wawasan kebangsaan adalah sebuah cara memandang oleh Bangsa Indonesia dalam mengenai diri bangsa dan lingkungannya dimana lebih memprioritaskan persatuan dan kesatuan suatu wilayah sesuai dengan amanat Pancasila, dan undang-undang dasar negara.(Siregar,2022)

Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa bangsa lain di dunia internasional. Nilai-nilai wawasan Kebangsaan yaitu: Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air

dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur (Cahyani, 2022)

Ketika generasi muda yang digawangi peserta didik khususnya mereka yang masih di bangku sekolah menengah atas sudah tidak memiliki wawasan kebangsaan serta rasa nasionalisme yang utuh ini akan menjadi alarm bahaya bagi negara Indonesia, karena aset yang dimilikinya sudah tidak mepedulikan negaranya sendiri. Hal ini menjadi tantangan dan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu sangat dibutuhkan penguatan nilai-nilai bangsa dan pemahaman tentang bangsa Indonesia ini sebagai fondasi, sehingga para generasi muda sebagai penerus bangsa, selain unggul dalam memanfaatkan teknologi di era global sekarang, mereka pun tetap dapat mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia serta mampu bertahan dari pengaruh-pengaruh perkembangan zaman. Dilihat dari berbagai generasi, perlahan namun pasti kesadaran akan berbangsa dan bernegara semakin berkurang, bahkan generasi sekarang begitu enggan untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara.

Rasa Kebangsaan adalah kesadaran bangsa yang tumbuh secara alamiah dalam setiap diri seseorang karena kebersamaan sosial yang berkembang dari kebudayaan, adat istiadat dan aspirasi perjuangan. Wawasan Kebangsaan membentuk orientasi, persepsi, sikap dan perilaku yang dapat dihayati bersama oleh seluruh rakyat bangsa, bahwa mereka itu satu bangsa, walaupun berbeda agama, suka dan budaya. Wawasan kebangsaan ini juga diharapkan dapat membuat Peserta didik paham mengenai aksi bela negara, Menurut Supriyono (2021) Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1) Cinta Tanah Air. 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. 3) Pancasila. 4) Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara. 5) Memiliki Kemampuan Bela Negara.

Di dalam konsep wawasan kebangsaan terkandung beberapa unsur. Menurut Amal dan Armawi, bahwa unsur-unsur wawasan kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen adalah rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Penjelasan senada dijelaskan oleh

Departemen pendidikan nasional (Depdiknas) bahwa konsep wawasan kebangsaan mengacu pada tiga hal, yaitu:

TABEL 2.1 KISI-KISI INDIKATOR

No	Indikator	Sub indikator
1	Paham kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Paham kebangsaan siswa
2	Rasa kebangsaan dan Semangat kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan siswa.
3	Pemahaman materi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan siswa dalam menerima atau merespon materi yang disampaikan dengan baik.

(Sumber; depdiknas, 2019)

Dengan demikian sangat jelas bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan atas dasar kesadaran bersama warga negara suatu bangsa dalam wilayah NKRI. Unsur-unsur wawasan kebangsaan yang terdiri dari rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan dalam penelitian ini menjadi indikator wawasan kebangsaan siswa SMA.

Pendidikan wawasan kebangsaan diimplementasikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasarkan operasional pendidikan yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum Khusus SMA pada mata pelajaran Kenusantaraan dan Kepemimpinan. Siswa SMA dididik untuk menjadi kader yang mempunyai jiwa kepemimpinan, berwawasan kebangsaan, kejuangan dan kepemimpinan.

Wawasan kebangsaan mencakup beberapa hal penting

- Kesatuan Wilayah: Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, meliputi daratan, lautan, dan udara. Tidak ada bagian yang lebih penting dari bagian lainnya.
- Kesatuan Politik: Indonesia menganut sistem negara kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusi.
- Kesatuan Sosial Budaya: Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya justru memperkaya bangsa Indonesia.
- Kesatuan Ekonomi: Pembangunan ekonomi harus merata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
- Kesatuan Pertahanan Keamanan: Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara.

Tujuan Wawasan Kebangsaan:

Wawasan kebangsaan hadir untuk Mencapai cita-cita nasional:

- Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- Menjaga keutuhan NKRI: Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat: Memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menciptakan lapangan kerja.
- Menjadi bangsa yang mandiri dan bermartabat: Tidak tergantung pada negara lain dan memiliki harga diri.

Implementasi Wawasan Kebangsaan:

- Pendidikan: Menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.
- Penegakan hukum: Menjaga ketertiban dan keamanan.
- Partisipasi masyarakat: Mendorong masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Pentingnya pelajaran PPKn dalam meningkatkan Wawasan Kebangsaan

- Menjaga persatuan dan kesatuan: Di tengah keberagaman, wawasan kebangsaan menjadi perekat bangsa.
- Menghindari perpecahan: Mengatasi berbagai ancaman yang dapat memecah belah bangsa.
- Menjadi bangsa yang kuat: Dengan bersatu, kita dapat menghadapi berbagai tantangan global.

2.1.4. Aspek Wawasan Kebangsaan

Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan, pada Seminar Pendidikan Wawasan Kebangsaan (1993) dikemukakan perlunya dipahami 2 (dua) aspek sebagai berikut:

a) Aspek moral.

Konsep wawasan kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri atau commitment pada seseorang atau masyarakat untuk bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa.

b) Aspek intelektual.

Konsep wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang serta berbagai potensi yang di miliki bangsa.

2.1.5. Definisi Siswa

Pengertian siswa dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang/anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). Menurut Prof. Dr. Shafique Ali Khan pengertian siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Sedangkan menurut Sardiman, pengertian siswa adalah orang yang datang kesekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada masa ini siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Masa ini secara global berlangsung antara usia 12-22 tahun.

Siswa merupakan pelajar yang duduk dimeja belajar setrata sekolah dasar maupun menengah pertama (SMP), sekolah menengah keatas (SMA). Siswa-siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dalam dunia pendidikan. Menurut Sarwono, siswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Dari pendapat tersebut bisa dijelaskan bahwa asiswa adalah

status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan dunia pendidikan yang diharapkan menjadi calon-calon intelektual untuk menjadi generasi penerus bangsa.

Menurut Arifin, menyebut “siswa”, maka yang dimaksud adalah manusia didik sebagai makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah masing-masing yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal yakni kemampuan fitrahnya. Akan tetapi dalam literatur lain ditegaskan, bahwa anak didik (siswa) bukanlah hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan dan pengasihan orang tua, bukan pula anak yang dalam usia sekolah saja. Pengertian ini berdasar atas tujuan pendidikan, yaitu manusia sempurna secara utuh, untuk mencapainya manusia berusaha terus menerus hingga akhir hayatnya. Maka dapat disimpulkan, pengertian siswa sebagai orang yang memerlukan ilmu pengetahuan yang membutuhkan bimbingan dan arahan untuk mengembangkan potensi diri (fitrahnya) secara konsisten melalui proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga tercapai tujuan yang optimal sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab dengan derajat keluhuran yang mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Sedangkan menurut para ahli psikologi kognitif memahami anak didik (siswa), siswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan, Mengacu dari beberapa istilah siswa, siswa diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan, yang dalam berbagai literatur murid juga disebut sebagai anak didik.

Dalam hal ini siswa dilihat sebagai seseorang (subjek didik), yang mana nilai kemanusiaan sebagai individu, sebagai makhluk sosial yang mempunyai identitas moral, harus dikembangkan untuk mencapai tingkatan optimal dan kriteria kehidupan sebagai manusia warga negara yang diharapkan. Dari pendapat tersebut bisa dijelaskan bahwa siswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan dunia pendidikan yang diharapkan menjadi calon-calon intelektual untuk menjadi generasi penerus bangsa.

2.2.Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Implementasi pelajaran PPKn yang menjadi kerangka utama, yang digunakan oleh peneliti dan penerima manfaat yang dikolaborasikan ke dalam kegiatan penelitian.

Pelajaran PPKn merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting dalam meningkatkan wawasan kebangsaan siswa, sehingga menjadikan mereka siswa yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan juga menambah pengetahuan mereka mengenai bangsa mereka sendiri. Banyak siswa yang acuh tak acuh mengenai peran mereka sebagai warga negara, cenderung malas dan kurangnya rasa ingin tau mengenai sejarah bangsanya, dan bahkan tidak faham jati dirinya yang lahir di tanah yang banyak akan perbedaan suku, agama dan budaya, bahkan untuk mengikuti upacara bendera dihari senin saja masih enggan, apalagi untuk berkontribusi dalam upaya bela negara.

Oleh karena itu dibutuhkan upaya dalam peningkatan efektifitas pembelajaran PPKn untuk lebih meningkatkan wawasan kebangsaan siswa, dan menjadikan siswa yang merupakan generasi muda bangsa agar memiliki moral yang ber asas kan pada nilai nilai pancasila dan dapat saling menghargai perbedaan karena indonesia negara yang kaya akan perbedaan “Bhineka Tunggal Ika”. Dengan adanya penguatan pembelajaran PPKn didalam kelas diharapkan dapat semakin meningkatkan wawasan kebangsaan siswa dan menjadi langkah pertama dalam

menyiapkan generasi emas bangsa yang memiliki paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

2.3. Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan adalah untuk menjelaskan posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini antara lain adalah:

1. “Pengaruh Pembelajaran PKn terhadap Wawasan Kebangsaan Mahasiswa Universitas Riau” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran PKn terhadap wawasan kebangsaan mahasiswa Universitas Riau penelitian ini dilakukan di Universitas Riau dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. (Novaroza et al., 2023)
2. “Implementasi Wawasan Kebangsaan Terhadap Pelajar Untuk Meningkatkan Kepatuhan Peraturan Sekolah” Wawasan kebangsaan merupakan salah satu ilmu yang wajib dipupuk dan di tanamkan dalam diri remaja, terutama kalangan pelajar, mulai dari lingkup pelajar Menengah Pertama maupun Menengah Atas. (Al Farisi et al., 2023)
3. “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan Di Kehidupan Bangsa Indonesia” Pembahasan mengenai wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan secara terus menerus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Aisyah et al., 2021)
4. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi” Bangsa Indonesia selaku negara yang tidak dapat menjauhi tantangan globalisasi, namun dengan berpegang pada Pancasila selaku panduannya, prinsip Indonesia hendaknya bisa mempertahankan jati diri serta eksistensinya. (D. A. Dewi, 2021)
5. “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Penanaman Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda” Pancasila bukan sekedar selaku konsep ideologis bangsa Indonesia, melainkan pula menjadi fondasi serta norma hidup warga yang terdapat di tanah air. (Saputri & Najicha, 2023)

6. “Implementasi Sila Ketiga Pancasila Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Muatan Ppkn Siswa Kelas Iv Di Sdn Wojo” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi, faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi mengatasi hambatan siswa dalam implementasi sila ketiga pancasila sebagai wawasan kebangsaan pada muatan PPKn siswa kelas IV SDN Wojo. (Pratomo et al., 2022)